

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Abdul Basir, *Penegakkan Hukum Pidana Perpajakan di Indonesia*. Surabaya, Cipta Media Nusantara, 2022.
- Agus Salim dan Haeruddin, *Dasar-dasar Perpajakan*. Palu, LPP-Mitra Edukasi, 2019.
- Agustina P Nugraheni, dan S.A Khotijah, *Perpajakan Berdasarkan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Magelang, Pustaka Rumah Cinta, 2022.
- Alvi Syahrin, *Ketentuan Pidana dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta, Sofmedia, 2019.
- Alvi Syahrin, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan*, Softmedia, Jakarta, 2009., hlm. 23.
- Anang Mury Kurniawan, “Upaya Hukum Terkait Dengan Pemeriksaan, Penyidikan, Dan Penagihan Pajak,” 2011, hlm 58.
- Anthon Fredy Susanto,. “*Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatif*”. Malang, Setara Press, 2015.
- Chairul Huda, *Dan Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan Kedua, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 68
- Darji Darmodihardjo & Sidharta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1995., hlm. 138-139.
- Eddy O.S. Hiariej, *Hukum Pidana*, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2019., hlm 110.
- Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016., hlm. 24.
- Henry Black, *Black's Law Dictionary, Fifth Edition*, St. Paul Minnessota, West Publishing Co, 1979., hlm. 307.

- Herlina Manulang dan Riki Yanto Pasaribu, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Medan, LPPMUHN Press Universitas HKBP Nomensen, 2020.
- Heryoso Setyono, *Kejahatan Korporasi, Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Edisi kedua Cetakan Pertama, Malang: Banyumedia Publishing, 2002., hlm. 17.
- Ida Zuraida, *Bahan Ajar DTSS IDLP Dasar*, Jakarta: Pusdiklat Pajak, 2015.
- I Made Widnyana, *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta, Fikahati Aneska, 2010.
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta, Sinar Grafika, 2006.
- Jeni Susyanti dan Ahmad Dahlan. *Perpajakan Untuk Praktisi dan Akademisi*. Malang, Empat Dua Media, 2015., hlm. 2-3.
- Jeremy Bentham, *Teori Perundang-undangan: Prinsip-prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, edisi Indonesia oleh Nurhadi, Bandung: Nusa Media & Nuansa, 2006., hlm. 33.
- J.B. Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Prenhallindo, 2001., hlm.93.
- Kristian, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Bandung: Refika Aditama, 2016., hlm. 24.
- Mardiasmo. *Perpajakan. Edisi Revisi 2009*, Yogyakarta, Andi Publisher, 2010, hlm.1.
- M.Djafar Saidi, *Pembaharuan Hukum Pajak*, RajaGrafindo Persada, 2018.
- M. Y. Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*. Ed. 2, Cet. 15. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineke Cipta, 2008., hlm. 54.
- Moelyatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 2002., hlm. 22-23.
- Muhammad Zain, *Manajemen Perpajakan, Edisi Kedua*, Salemba Empat, Jakarta, 2005, hlm. 43
- Oeripan Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*. Editor Tribudiyono, Salatiga, Griya Media, 2011.

- Radbruch Gustav, *Legal Philosophy*, II, 1932, dalam 20th Century Legal Philosophy Series: Vol. IV, The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin, Translated by Kurt Wilk, Harvard University Press, Cambridge. Massachusetts, 1950., hlm. 49.
- Rhiti Hyronimus, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima. Yogyakarta, Universitas Atma Jaya. 2015., hlm. 241.
- Rocmat Soemitro, dan D.K Sugiharti. *Asas dan Dasar Perpajakan 1 Cetakan Kedua*. Bandung, Refika Aditama, 2010., hlm. 14.
- Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017. hlm. 16.
- Ruslan Renggong,. *Hukum Pidana Khusus,Memahami Delik- delik di Luar KUHP*. Jakarta: Kencana, 2016., hlm.12.
- R.Santoso Brotodihardja, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Cetakan kedua puluh tiga*. Bandung, Refika Aditama, 2013., hlm.1.
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, 1983, hlm.24.
- Simon Nahak, *Hukum Pidana Perpajakan Konsep Penal Policy Tindak Pidana Perpajakan dalam Perspektif Pembaharuan Hukum*, Jakarta: Setara Press, 2014., hlm. 65.
- Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Indonesia – Konsep dan Aspek Formal*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010. Hlm. 213
- Siti Resmi, *Perpajakan Teori dan Kasus Buku 1 Edisi Ketujuh*. Jakarta, Salemba Empat, 2019., hlm.3.
- Soedarto. *Hukum Pidana Jilid I A-B*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. 1975., hlm. 7.
- Soerjono Soekanto, *Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2007.
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta, Sinar Grafika, 2011.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Liberty 2007)*., hlm138
- Sutan Remi Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Grafiti Pers, 2006., hlm. 43.

Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*. Semarang, Aneka, 1977.

Yohanes S Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak -Edisi Revisi*. Yogyakarta, Andi Offset, 2006., hlm.7.

Ziski Aziz, *Perpajakan–Teori dan Kasus*. Medan, Madenatera, 2016., hlm. 4-8.

## **B. Sumber Perundang-undangan**

Republik Indonesia, Undang Undang Dasar 1945 Pasal 23 A

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pasal 1 ayat 1.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang telah diubah terakhir dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 2.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan Pasal 39A

Republik Indonesia, Undang undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai. Pasal 1 angka 23

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 33 ayat (3)

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010, Pasal 1 Ayat 3

Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Pasal 4 (1).

Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penerapan Beberapa Ketentuan dalam Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Poin 1

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.03/2022 Tentang Tatacara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Pasal 1 (6).

Republik Indonesia, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2022. Pasal 3(2)

Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Kasasi No: 2239 K/PID.SUS/2012.[472]*.

Pengadilan Negeri Jakarta Barat, 2020, *Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt*

Pengadilan Tinggi Semarang, 2021, *Putusan Nomor 258/PID/2021/PT.SMR*

### C. Jurnal dan Karya Ilmiah Lainnya

A.L. Tarigan (2016) Thesis: “*Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Praktik Transfer Pricing Bidang Perpajakan di Indonesia.*” (Medan: USU, 2016)., hlm.ix.

Al-Firdaus, F. (2018). “*Studi Eksploratif Penanganan Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya*”. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 1(2)., hlm.14–30. <https://doi.org/10.31092/jpi.v1i2.194>

Abdul Bashir, (2021) Doctoral Thesis: *Ultimum Remedium dalam Tindak Pidana Pajak Wajib Pajak Badan dan Upaya Pengembalian Kerugian Pada Pendapatan Negara.* (Jakarta: Universitas Jayabaya),, hlm.xi

Bina Yumanto, 2021, *Memahami Konsep dan Subjek Pertanggungjawaban Pidana dalam Pasal 39A UU No 28 Tahun 2007*, Scientax: Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia Vol. 3 No. 1 diakses dari <https://ejurnal.pajak.go.id/st/article/download/250/55>., hlm. 169.

Bima Yumanto dan P.A.S. Hutauruk. *Ultimum Remedium Dalam Hukum Pidana Pajak: Teori dan Praktik.* Jurnal Scientax Vol.4 No.1, Oktober, 2022., hlm.107-149.

Dwi Setyo Budi Utomo, Doctoral Thesis: *Rekonstruksi Penegakan Hukum Pidana Denda Terhadap Pelanggaran di Bidang Perpajakan Berdasarkan Nilai Keadilan.* (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2020)., hlm. viii.

Diana Malemita Ginting, Doctoral Thesis: “*Penegakan hukum terhadap wajib pajak sebagai korporasi: kajian atas kepatuhan dan kepastian hukum*”. Jakarta: Universitas Pelita Harapan, 2020)., hlm.ix

Inge Dwisvimiari, “*Keadilan dalam perspektif filsafat ilmu hukum.*” Jurnal Dinamika Hukum 11.3 (2011): 522-531

- Iman Santoso dan Ning Rahayu, *Corporate Tax Management, Observation & Reseach of Taxation (Ortax)*, Jakarta, 2019, hlm. 21
- Lutfil Ansori., “*Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif*”, *Jurnal Yuridis*, Vol. 4 No. 2, 2017, 148-163.
- Meliah Ariyani dan Tyas Erasari Utami, “*Pengaruh Pelayanan Aparat Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Motivasi Wajib Pajak OP dalam Membayar Pajak Penghasilan*” *Jurnal TEKUN/VOLUME VII*, No.01, Maret 2016: 1 – 22., hlm. 9.
- Mudzakkir, *Pengaturan Hukum Pidana Di Bidang Perpajakan Dan Hubungannya Dengan Hukum Pidana Umum Dan Khusus*, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 8 No. 1 - April 2011, hal 48
- Muhammad Al Gifary, *Tinjauan Perubahan Penegakan Hukum Pidana dalam UU HPP terhadap Pemulihan Kerugian pada Pendapatan Negara*. KTTA thesis, Jakarta: Politeknik Keuangan Negara STAN, 2022., hlm xv.
- Muladi, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana (Corporate Criminal Liability)*, Makalah pada Seminar Nasional tentang Aspek Pertanggungjawaban Pidana dalam Kebijakan Publik dari Tindak Pidana Korupsi, Kejaksaan Agung RI dan FH UNDIP, Semarang 6-7 Mei 2004., hlm. 6.
- Radbruch Gustav, *Legal Philosophy*, II, 1932, dalam 20th Century Legal Philosophy Series: Vol. IV, *The Legal Philodophies of Lask, Radbruch, and Dabin*, Translated by Kurt Wilk, Harvard University Press, Cambridge. Massachusetts, 1950., hlm. 49-224.
- Rani Nurfaziah, 2018, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perpajakan Dalam UU Perpajakan di Kanwil DJP Riau dan Kepri*, *Jurnal Online Mahasiswa FH Univ. Riau*, Volume V Edisi 2 Juli-Desember 2018, diakses dari <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/22019/21309>., hlm. 6
- Sindian Jayaningrat, *Makna dari Hukum Fiskal*, disampaikan pada Pidato ilmiah Die Natalis Sekolah Tinggi Ilmu Keuangan Negara ke VIII, Jakarta, 27 April 1968.
- Sofia Yonas, “*Pertanggungjawaban Pidan Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Pada PT. Merpati Nusantara Airlines*” *Journal Soedirman Law review*, Vol.3, No.2 (2021)., hlm.5

Susan M. Lyons, *International Tax Glossary* (3rd Edition), International Bureau of Fiscal Document, Amsterdam, 1996

### C. Sumber Lain

Bismar Nasution, *Kejahatan Korporasi*,  
<https://bismar.wordpress.com/2009/12/23/kejahatan-korporasi/>, Diakses tanggal 05 September 2023, Pukul 15.56 Wib.

Direktorat Jenderal Pajak, *Laporan Tahunan DJP 2021*,  
<http://pajak.go.id/sites/default/files/2022-11/Laporan%20Tahunan%20DJP%202021%20-%20Bahasa.pdf>.  
 Diunduh tanggal 11 Agustus 2023.

Hukumonline. *Upaya Preventif dan Represif dalam Penegakan Hukum*,  
<https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-dan-represif-dalam-penegakan-hukum-lt63e0813b74769/?page=1> diakses tgl 5 September 2023, Pukul 17.10 wib.

Kementerian Keuangan RI, *Informasi APBN 2023*. Jakarta, 2023,  
<https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/6439fa59-b28e-412d-adf5-e02fdd9e7f68/Informasi-APBN-TA-2023.pdf?ext=.pdf>. Diunduh tanggal 10 Agustus 2023.

Kementerian Keuangan RI, *Penerimaan Perpajakan 2005-2022*.  
<https://data-apbn.kemenkeu.go.id/lang/id/post/9/pendapatan-negara>.  
 Diunduh tanggal 10 Agustus 2023.

Kementerian Keuangan RI, *Informasi APBN 2024*. Jakarta, 2023,  
<https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/apbn-2024-telah-disahkan:-perkuat-perekonomian-melalui-transformasi-ekonomi-yang-berkelanjutan> diunduh tanggal 22 September 2023.

Perpajakan.ddtc.co.id. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-17/PJ/2018 Poin E Angka 1a.  
 diakses dari <https://perpajakan.ddtc.co.id/sumber-hukum/peraturan-pusat/surat-edaran-direktur-jenderal-pajak-se-17pj2018>.

<https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/hubungan-tax-avoidance-tax-planning-tax-evasion-anti-avoidance-rule> (diakses tanggal 29/01/2024, pukul 10.12).

<https://newssetup.kontan.co.id/news/penghindaran-pajak-membuat-rugi-negara-rp-687-triliun-ini-kata-dirjen-pajak> (diakses tanggal 29/01/2024, pukul 10.15)